



► DANA KEISTIMEWAAN

BKK Berkurang, Padat Karya Terpangkas

Ariq Fajar, Khairul Ma'arif, & David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) DIY pada 2025 berdampak signifikan terhadap sejumlah program di tingkat kalurahan. Salah satu yang terdampak langsung adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kalurahan, yang terpaksa dipangkas hingga Rp22,3 miliar akibat berkurangnya Danais dari Rp1,2 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp1 triliun tahun ini.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan, Aris Eko Nugroho, menjelaskan pengurangan anggaran tersebut berimbas pada program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan melalui skema BKK.

► Halaman 10

BKK Berkurang,...

Salah satunya adalah program Padat Karya Jogja Istimewa yang selama ini menjadi salah satu andalan dalam menggerakkan ekonomi lokal berbasis kegiatan komunitas. "Biasanya kami alokasikan Rp175 juta, terpaksa tahun ini kita kurangi jadi Rp120 juta. Jadi padat karyanya tidak bisa seoptimal tahun sebelumnya," ungkap Aris, Selasa (22/7).

Meski bukan bersifat proyek, program padat karya dianggap penting karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengurangan alokasi dianggap turut memengaruhi kualitas pemberdayaan sosial ekonomi di tingkat bawah.

Aris juga mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah daerah tidak menginginkan adanya pemotongan anggaran untuk kalurahan. Namun, jika pemangkasan tidak dilakukan, pengurangan Danais sebesar Rp200 miliar tidak akan bisa dicapai. Meski terjadi penyesuaian besar, Aris memastikan alokasi BKK untuk kalurahan tetap diupayakan berjalan

optimal. Total anggaran yang dialokasikan pada 2025 masih berada di atas Rp140 miliar, yang merupakan konsolidasi dari BKK sebelumnya.

Di Kulonprogo dana BKK berkurang sekitar Rp5 miliar dari sebelumnya Rp32,7 miliar menjadi Rp27,4 miliar pada tahun ini. Kepala DPMK Dalduk BK Kulonprogo, Muhadi, menjelaskan pengurangan terbesar terjadi pada BKK untuk rumah tidak layak huni (RTLH) bergaya arsitektur Jogja. BKK RTLH didapatkan 23 kalurahan di sembilan kapanewon. Dari jumlah sebanyak itu hanya Kalurahan Sogan dan Karangsewu yang tidak mengalami pengurangan dana BKK RTLH ini. Sedangkan 21 kalurahan sisanya terdampak pengurangan.

Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian, mengatakan BKK kalurahan di Bumi Handayani Rp41,56 miliar. Namun, dengan adanya efisiensi maka ada pengurangan menjadi Rp30,29 miliar. "Ada

pengurangan sekitar Rp11,47 miliar," katanya.

Kabupaten Sleman terkena efisiensi danais Rp14,25 miliar. Efisiensi ini menyebabkan proses pembangunan taman budaya batal. Kepala BKAD Sleman, Abu Bakar, mengatakan efisiensi cukup besar menyasar pembangunan Taman Budaya Sleman. "Taman Budaya Sleman kena efisiensi Rp5,77 miliar. Cukup besar juga angka ini."

Adapun, Bappeda Jogja mencatat alokasi danais 2025 berkurang dari Rp44,2 miliar menjadi Rp43,6 miliar. Ketua Tim Kerja Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD Bappeda Kota Jogja, Arief Eka Tirtakusuma, menyampaikan dengan penurunan alokasi tersebut tidak berpengaruh pada proyek strategis Pemkot Jogja. Hal tersebut lantaran proyek strategis Pemkot Jogja dialokasikan dengan anggaran dari APBD Kota Jogja tahun 2025. (Stefani Yulindriani & Andreas Yuda Pramono)